

Laporan pantauan berkala yang pertama ini menyoroti hasil studi kualitatif SMERU di tujuh komunitas dan hasil pemantauan media hingga pertengahan Oktober 2009. Studi-studi tersebut mengungkapkan berbagai dampak krisis keuangan global (KKG) 2008/09 yang tengah terjadi di Indonesia. Pada umumnya, dampak negatif mulai terasa pada Oktober–November 2008 dan mencapai puncaknya pada Januari–Februari 2009. Akhir-akhir ini, kondisi mulai stabil dan mulai terjadi sedikit pemulihan di beberapa sektor. Namun, keparahan dampak krisis bervariasi antarjenis penghidupan dan bergantung pada keamatan hubungan suatu sektor dengan negara-negara maju yang sangat terguncang oleh krisis. Sektor-sektor yang mengalami lonjakan ekspor yang tajam akibat depresiasi rupiah selama krisis keuangan Asia (KKA) 1997/98 cenderung mengalami dampak KKG 2008/09 yang lebih parah daripada sektor lain. Meskipun mulai terlihat tanda-tanda pemulihan, terdapat indikasi kecenderungan penurunan tingkat upah yang diterima buruh industri. Di tingkat masyarakat, kelompok yang lebih miskinlah yang paling menderita. Walaupun demikian, pengalaman masyarakat memperlihatkan manfaat beberapa program perlindungan sosial yang sedang berjalan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, dalam meringankan beban akibat dampak KKG 2008/09.

1 Pendahuluan

KKG 2008/09 memengaruhi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun, data makro menunjukkan bahwa dampak krisis tersebut terhadap Indonesia tidaklah terlalu parah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama triwulan keempat 2008 mengalami penurunan ke tingkat 5,2% (*year on year*)—dibandingkan pertumbuhan 6,4% pada triwulan ketiga 2008. Indonesia juga masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,4% pada triwulan pertama dan 4% pada triwulan kedua 2009. Pemilahan menurut sektor memperlihatkan bahwa penurunan terbesar terjadi pada industri manufaktur—terutama produk tekstil, kulit, alas kaki, dan kayu. Sektor lain yang pertumbuhannya melambat adalah sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran—terutama perdagangan grosir dan eceran. Dari sisi penggunaan, ekspor dan impor mengalami pertumbuhan negatif, sementara pembentukan modal menurun secara signifikan selama dua triwulan terakhir.

Sementara para pengamat ekonomi merasa optimistis bercampur waspada, ada kekhawatiran terhadap apa yang terjadi di tingkat masyarakat dan di sektor riil, sesuatu yang berada di luar jangkauan data-data makro. Dalam upaya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak sosial dan ekonomi KKG 2008/09, sejak Juli 2009, Lembaga Penelitian SMERU melakukan serangkaian studi melalui kegiatan pemantauan media, analisis data sekunder, dan pemantauan kualitatif di tingkat lokal.ⁱ

Laporan ini merangkum temuan-temuan dan hasil analisis beberapa studi yang dilakukan mulai Juli hingga pertengahan Oktober 2009. Studi-studi tersebut mencakup pemantauan berita di berbagai surat kabar dan majalah nasional dan daerah, analisis data sekunder dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan BI (Bank Indonesia), dan pemantauan kualitatif di tujuh komunitas yang berpotensi mengalami dampak krisis. Ketujuh komunitas tersebut



SMERU

meliputi komunitas yang penghidupannya didukung oleh industri tekstil dan garmen (Bandung, Jawa Barat); sebuah kawasan industri yang kebanyakan dihuni industri otomotif dan elektronik (Bekasi, Jawa Barat); industri dan perkebunan kelapa sawit (Kampar, Riau); industri rumah tangga penghasil gerabah ekspor (Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat); industri mebel kayu (Jepara, Jawa Tengah); industri perikanan dan penangkapan ikan (Bitung, Sulawesi Utara); dan pekerja migran (Malang, Jawa Timur).ⁱⁱ Selain itu, analisis ini juga memasukkan hasil studi kualitatif SMERU di perkebunan karet dan kawasan industri otomotif dan elektronik pada Februari 2009.ⁱⁱⁱ Walaupun laporan pantauan berkala ini tidak menyajikan data yang representatif secara nasional, analisis kualitatif lebih diarahkan untuk mengidentifikasi siapa saja yang telah terkena dampak KKG 2008/09 dan memahami mengapa dampak yang dirasakan beberapa industri atau komunitas lebih ringan dibandingkan dengan dampak yang dirasakan industri atau komunitas lainnya.



Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia



Studi ini didanai oleh AusAID.

ⁱPandangan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis dan belum tentu mewakili Negara Persemakmuran Australia. Negara Persemakmuran Australia tidak bertanggung jawab atas kerugian terhadap seseorang/l lembaga yang disebabkan oleh informasi maupun pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini.

2 Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Masyarakat di Indonesia

Hasil pemantauan media dan studi kualitatif mengungkap dampak KKG 2008/09 terhadap berbagai sektor serta perbedaan cakupan dan tingkat keparahannya. Beberapa sektor yang terkena dampak krisis dipaparkan di bawah ini.

2.1 Komoditas Ekspor Pertanian

Banyak artikel surat kabar memberitakan bahwa beberapa komoditas perkebunan untuk tujuan ekspor, terutama karet dan kelapa sawit, terkena dampak negatif yang terparah akibat jatuhnya harga produk secara mendadak. Harga karet di pasar internasional turun dari 329,75 sen Amerika per kg pada Juni 2008 menjadi 280,5 sen Amerika per kg pada September 2008, dan pada Desember 2008 turun lebih jauh menjadi 120 sen Amerika per kg. Hal ini menyebabkan harga *lump* karet di tingkat petani di banyak daerah penghasil karet di Sumatra, Kalimantan, dan Jawa Barat turun drastis dari sekitar Rp10.000–Rp12.000 per kg menjadi Rp2.000–Rp3.000 per kg pada Desember 2008. Akibatnya, banyak petani tidak mau lagi menyadap pohon karet, atau membersihkan lahan kebun dan memupuk pohon karet mereka. Ada laporan bahwa beberapa petani di Banyuwasin, Sumatra Selatan, menjual lahannya dengan harga murah akibat anjloknya harga karet. Anjloknya pasokan *lump* karet telah menyebabkan beberapa pabrik pengolahan karet mengurangi hari kerja atau bahkan menghentikan sementara kegiatan operasionalnya. Dilaporkan bahwa enam pabrik pengolahan karet di Sumatra menghentikan kegiatan operasionalnya dan memberhentikan sekitar 3.000 pekerjanya. Namun, akhir-akhir ini diberitakan bahwa harga *lump* karet di tingkat petani di berbagai daerah penghasil di Sumatra dan Kalimantan terus meningkat ke sekitar Rp5.000–Rp6.000 per kg pada Juni. Di beberapa daerah, harganya telah mencapai Rp7.000 per kg pada Oktober 2009.

Studi lapangan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada Februari 2009 mengungkapkan bahwa para petani yang menanam karet menikmati penghasilan yang besar selama KKA 1997/98 karena harga *lump* karet di tingkat petani naik tajam dari sekitar Rp7.000 per kg menjadi Rp12.000 per kg. Oleh karena itu kesejahteraan masyarakat meningkat secara signifikan. Sebaliknya, setelah terjadinya KKG 2008/09, harga *lump* karet anjlok dari Rp11.200 per kg pada September 2008 ke tingkat harga terendah, yaitu Rp2.500 per kg, pada Oktober 2008. Kemudian, harga *lump* karet naik sedikit menjadi Rp3.750 per kg pada Januari 2009. Turunnya harga *lump* karet secara mendadak tersebut menyebabkan pendapatan pemilik lahan dan buruh tani turun secara signifikan. Kebanyakan petani tidak mampu membeli pupuk untuk pohon karet mereka. Banyak pemilik lahan yang mengurangi jumlah buruh taninya atau bahkan tidak mempekerjakan mereka sama sekali. Turunnya pendapatan dan kesempatan kerja memaksa para buruh tani untuk bekerja serabutan atau pindah untuk mencari pekerjaan ke daerah lain. Hal tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian lokal seperti perdagangan eceran dan usaha transportasi yang mengangkut orang, karet, dan batu bara, selain juga menurunkan volume perdagangan getah karet. Banyak petani yang mengkredit sepeda motor mengembalikan sepeda motornya kepada *dealer* (pedagang penyalur) karena mereka tidak mampu membayar angsuran. Saat ini, kondisi perekonomian telah sedikit membaik karena harga *lump* karet di tingkat petani terus meningkat dan mencapai Rp5.500–Rp6.500 per kg pada Oktober 2009, meskipun harga tersebut masih lebih rendah daripada harga sebelum KKG 2008/09.

Seperti yang terjadi pada komoditas karet, turunnya permintaan internasional terhadap minyak kelapa sawit (*CPO—crude palm oil*) telah berakibat pada menurunnya harga CPO secara signifikan dari US\$1.400 per metrik ton sebelum krisis menjadi sekitar US\$400–US\$500 per metrik ton. Akibatnya, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani juga turun dari Rp1.500–Rp2.000 per kg pada Juli 2008 menjadi sekitar Rp300 pada akhir 2008. Turunnya harga CPO dan TBS secara drastis menyebabkan kerugian besar, baik di kalangan petani maupun industri pengolahan kelapa sawit. Banyak petani tidak mampu membayar angsuran pinjaman modal kerja atau sepeda motor. Di Riau, misalnya, melaporkan bahwa lebih dari 280.000 petani tidak bisa membayar utang mereka—yang secara total mencapai 1,2 triliun rupiah. Pembatalan order menyebabkan penurunan ekspor CPO secara signifikan dan ambruknya banyak pabrik pengolahan kelapa sawit, termasuk pabrik-pabrik yang berlokasi di Sumatra Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dilaporkan bahwa pada triwulan kedua 2009, harga CPO meningkat menjadi US\$750 per metrik ton, tetapi harga TBS masih bergejolak—di Sumatra Selatan, misalnya, harga TBS mencapai Rp1.400 per kg pada September 2009, tetapi kemudian anjlok menjadi sekitar Rp1.000 per kg pada Oktober 2009.

Studi lapangan di Kampar pada Juli 2009 menegaskan dampak serius dari turunnya harga CPO dan TBS. Di desa studi, harga TBS di tingkat petani turun dari Rp1.100 pada Juni 2008 menjadi Rp600 pada Oktober 2008, dan anjlok hingga Rp200–Rp350 pada Januari 2009. Kemudian naik menjadi Rp1.000 pada April 2009, tetapi turun lagi sedikit menjadi Rp750 pada Juni 2009. Selama harga TBS berada pada tingkat terendah, banyak petani tidak memanen kelapa sawit mereka atau walaupun mereka memanennya untuk menjaga produktivitas pohon, mereka tidak menjual hasil panen ke pabrik pengolahan kelapa sawit karena biaya transportasinya lebih tinggi daripada harga kelapa sawit. Hampir semua petani tidak mampu membayar angsuran pinjaman modal kerja dan konsumsi (sebagian besar untuk membeli sepeda motor) ke lembaga simpan-pinjam desa yang didanai oleh pemerintah daerah sehingga dilakukan penjadwalan ulang pinjaman. Karena harga pupuk (*urea*) melonjak tajam dari Rp1.800 per kg pada Juli 2008 menjadi Rp8.000 per kg pada September 2008 hingga April 2009, para petani tidak mampu membeli pupuk. Industri pengolahan kelapa sawit juga terkena dampak serius karena produksi CPO turun drastis dan CPO yang tidak dapat diekspor dibiarkan menumpuk dalam jumlah besar di Pelabuhan Dumai. Walaupun pabrik-pabrik tersebut tidak memecat karyawannya, mereka mengurangi jam kerja dari 12 jam menjadi 10 jam per hari. Hal ini menyebabkan turunnya pendapatan pekerja dari sekitar 1,9 juta rupiah menjadi 1,4 juta rupiah per bulan. Hal yang sama terjadi juga di perkebunan kelapa sawit. Baik perkebunan milik



SMERU

negara maupun milik swasta tidak memecat pekerjanya, tetapi mereka menghapus lembur sehingga pendapatan bulanan para pekerja perkebunan anjlok dari 2,5 juta rupiah menjadi 1,08 juta rupiah. Turunnya pendapatan petani, pekerja pabrik, dan pekerja perkebunan menyebabkan perputaran uang di pasar mingguan setempat anjlok dari sekitar 400 juta rupiah sebelum krisis menjadi 100 juta rupiah saat krisis mencapai puncaknya. Pada Juli 2009, kondisinya sedikit membaik dan omzet pasar mingguan tersebut naik menjadi 200 juta rupiah.

Di samping karet dan kelapa sawit, komoditas ekspor lainnya yang oleh banyak artikel surat kabar diberitakan terkena dampak krisis adalah kopi, kakao, kopra, jagung, dan singkong. KKG 2008/09 menyebabkan turunnya permintaan internasional terhadap kopi dan harga kopi dunia turun sedikit dari US\$3.800 menjadi US\$3.200 per metrik ton. Di antara dampak yang diberitakan adalah sebagai berikut. Di Jawa Timur, ekspor kopi turun 25%–30% dan harganya turun dari Rp18.000 menjadi Rp16.000 per kg. Di Bandar Lampung, harga kopi anjlok dari Rp25.000 menjadi Rp16.000 per kg, sementara di Sumatra Selatan turun dari Rp15.000 menjadi Rp11.000 per kg. Di Sumatra Utara, banyak pengeksport kopi ke Amerika Serikat pailit karena mereka sudah terlanjur membeli kopi dari petani jauh sebelum harga kopi anjlok. Namun, baru-baru ini harga kopi meningkat lagi karena terbatasnya produksi, sebelum memasuki musim panen.

Untuk kasus kakao, di Bali harganya anjlok dari Rp31.000 menjadi Rp17.000 per kg, sementara di Sumatra Utara turun dari Rp20.000 menjadi Rp16.000. Ekspor kakao dari Sulawesi Selatan turun dari 47.240 ton pada Januari–Mei 2008 menjadi 37.204 ton pada periode yang sama pada 2009. Selain itu, dari 14 pabrik pengolahan kakao di Indonesia, 12 di antaranya telah menghentikan produksi akibat turunnya permintaan terhadap kakao dari Amerika dan Eropa secara signifikan, selain akibat penundaan pembayaran yang terlalu lama sehingga mengganggu aliran uang kas (*cash flow*). Akhir-akhir ini harga kakao telah kembali normal. Di Lampung, misalnya, harga kakao kering kualitas premium pada September dan Oktober 2009 terus meningkat dari Rp23.000–Rp24.000 menjadi Rp25.000–Rp27.000 per kg.

Komoditas lain yang juga diberitakan dalam berbagai artikel surat kabar adalah kopra yang harganya jatuh hampir 50% di Sumatra Barat dan Jambi. Harga jagung di Lampung juga diberitakan turun 50%, sementara harga jagung di Gorontalo relatif stabil. Di Lampung, harga singkong juga diberitakan anjlok 50%. Sementara itu, di Sumatra Utara, ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran ke Singapura sempat turun selama beberapa saat.

Produk perikanan untuk ekspor juga diberitakan telah mengalami penurunan. Beberapa artikel surat kabar mengemukakan bahwa ekspor ikan kaleng dan ikan olahan dari Sulawesi Utara turun 40% pada 2008, dibandingkan dengan ekspor pada 2007. Penurunan ini terjadi karena permintaan dari beberapa negara tujuan ekspor utama, seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa, turun selama periode Oktober–Desember 2008. Di Jawa Timur, permintaan ekspor udang turun 10%–15% selama Oktober 2008, tetapi kemudian naik 7% selama Maret 2009. Di Bandar Lampung, harga udang turun dari Rp42.000–Rp47.000 per kg pada pertengahan 2008 menjadi sekitar Rp38.000 pada akhir 2008. Di Jakarta, selama krisis harga tuna ekspor turun dari Rp12.500–Rp14.000 per kg menjadi Rp8.000 per kg. Namun, KKG 2008/09 bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan turunnya ekspor perikanan karena juga terdapat beberapa permasalahan di bidang produksi. Hasil studi lapangan di daerah industri perikanan di Bitung pada awal Oktober 2009 tidak memperlihatkan adanya dampak signifikan KKG 2008/09, baik terhadap industri perikanan terkait maupun masyarakat perikanan di sekitarnya. Hal ini bisa terjadi

karena sebagian besar perusahaan perikanan setempat mampu mengalihkan ekspor mereka dari pasar di Amerika Serikat dan Jepang yang sedang menurun ke negara-negara lain di Timur Tengah, Uni Eropa, dan Asia, termasuk Cina dan Korea Selatan. Harga ekspor tuna dan ikan kaleng relatif stabil. Hanya satu produk, yaitu ikan kayu, yang biasanya diekspor ke Jepang harganya turun dari US\$6,8 per kg pada November 2008 menjadi US\$4,8 per kg pada Desember 2008, dan kemudian mencapai kestabilan kira-kira pada harga US\$4,5 per kg pada bulan-bulan berikutnya. Namun, penurunan ini tidak begitu mengganggu kegiatan industri pengolahannya karena ekspor ke Jepang dapat dialihkan ke negara-negara Asia lainnya.

Permasalahan utama yang sedang dihadapi industri perikanan di Bitung adalah turunnya pasokan ikan karena Pemerintah Pusat baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan kapal penangkapan ikan merapat dan menurunkan hasil tangkapan di pelabuhan manapun yang letaknya berdekatan dengan lokasi penangkapan; tidak ada lagi keharusan bagi kapal tersebut untuk kembali ke pelabuhan pemberangkatannya. Akibat kebijakan ini, sebagian besar kapal ikan ukuran besar yang biasanya merapat di Bitung sekarang merapat dan menjual ikannya di Maluku. Hal ini berakibat pada menurunnya pasokan ikan di Bitung secara signifikan. Selain itu, kehidupan nelayan kecil menjadi makin sulit akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, terutama minyak tanah, dan peningkatan kegiatan penangkapan ikan oleh kapal-kapal besar. Banyak nelayan kecil berhenti menangkap ikan dan beralih profesi menjadi pekerja harian di industri-industri pengolahan ikan setempat yang makin berkembang baru-baru ini, atau mereka masuk ke sektor informal dan bekerja serabutan, termasuk sebagai supir ojek dan pekerja bangunan.

2.2 Produk Kayu dan Turunannya

KKG 2008/09 menyebabkan turunnya permintaan kayu dan mebel dari kayu di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Beberapa daerah di Indonesia yang mengekspor kayu dan kayu lapis (*plywood*), termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, and Papua, telah melaporkan adanya penurunan ekspor. Penurunan ekspor tersebut berdampak pada penghentian kegiatan operasional banyak pabrik penggergajian kayu (*sawmill*) dan pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 10.000 pekerja. Beberapa artikel juga mengungkapkan terjadinya penurunan ekspor mebel kayu dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Jepara merupakan penghasil utama kerajinan mebel ukiran dari kayu jati. Hasil studi lapangan di daerah ini memperlihatkan bahwa produsen dan pengeksport mebel taman untuk pasar Amerika Serikat dan Eropa adalah yang paling terkena dampak krisis dan sebagian kecil dari mereka yang masih bertahan telah mengalihkan pasarnya ke Eropa Timur. Di sisi lain, produsen mebel untuk di dalam ruangan (*indoor*) untuk pasar domestik dan Asia tidak terkena dampak krisis. Pengeksport mebel kayu ke Amerika Serikat dan Eropa menikmati keuntungan yang melimpah selama KKA 1997/98. Hal ini berakibat pada meningkatnya jumlah perusahaan domestik dan asing di daerah ini dan maraknya penebangan liar pohon-pohon jati, serta menurunnya kualitas mebel yang diproduksi. Dalam lima tahun terakhir, ekspor terus menurun akibat kualitas yang rendah dan penebangan liar. Industri ini juga terus menurun akibat kesulitan bahan baku dan tingginya harga kayu jati yang menjadi semakin langka. Bom Bali juga menyebabkan turunnya volume ekspor melalui Bali. Beberapa perusahaan asing mengatasi hal tersebut dengan membuka pabrik di daerah penghasil.

KKG 2008/09 membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih sulit karena beberapa pabrik mebel asing bangkrut dan banyak buruh lokal mengalami PHK. PHK tersebut terjadi baik pada buruh laki-laki maupun perempuan; umumnya laki-laki bekerja di bagian perakitan, sementara perempuan di bagian *finishing* (sentuhan akhir). Kebanyakan pekerja yang mengalami PHK beralih ke sektor pertanian atau perikanan, atau bekerja serabutan. Mereka pada umumnya pernah bekerja di sektor-sektor tersebut sebelum usaha pembuatan mebel berkembang pesat selama KKA 1997/98. Walaupun KKG 2008/09 menyebabkan menyusutnya perekonomian lokal, penghidupan masyarakat lokal tidak terlalu terpengaruh karena masih tersedianya alternatif mata pencaharian lain.



SMERU

2.3 Industri Pertambangan

Produk primer (bahan mentah) lain yang diberitakan terkena dampak krisis adalah hasil-hasil tambang, termasuk batu bara, nikel, bauksit, besi, baja, tembaga, aluminium, dan marmer. Di Kalimantan Selatan, harga batu bara kualitas bagus (mengandung 6.000 kilo kalori per kg) anjlok dari US\$90 per ton menjadi sekitar US\$50–\$60 per ton. Hingga Agustus 2009, produksi batu bara dari provinsi ini turun 40%–50% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, frekuensi pengangkutan batu bara dengan kapal di sepanjang sungai Mahakam turun dari 18–20 perjalanan per hari menjadi 10–12 perjalanan saja. Jatuhnya permintaan dan harga batu bara telah menyebabkan banyak usaha pertambangan, penampungan (*stockpile*), dan transportasi menghentikan aktivitas mereka. Baru-baru ini, permintaan dan harga batu bara mulai pulih, tetapi dampak negatif krisis diperpanjang oleh pemberlakuan kebijakan baru pemerintah provinsi setempat (melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 3/2008) yang melarang truk pengangkut batu bara dan kelapa sawit menggunakan jalan umum. Khususnya di Banjar, yaitu tempat diberlakukannya pelarangan tersebut, banyak usaha skala kecil dan menengah yang berkaitan dengan pertambangan terhenti karena jalan khusus untuk mengangkut batu bara dan kelapa sawit belum tersedia.

Di daerah-daerah lain, diberitakan bahwa dua perusahaan pertambangan besar, yaitu PT Freeport Indonesia (FI) di Papua dan PT Inco di Sulawesi Selatan, juga terkena dampak krisis. Untuk meningkatkan efisiensi, PT FI tidak melakukan PHK, tetapi tidak merekrut pegawai baru. Walaupun demikian, beratus-ratus buruh yang bekerja untuk subkontraktor PT FI mengalami PHK. Dalam kasus PT Inco, banyak pihak sangat mengkhawatirkan kemungkinan PHK sebagian pekerjanya. Namun, manajemen perusahaan tersebut menjamin bahwa hal tersebut merupakan

pilihan terakhir setelah upaya-upaya efisiensi lain, termasuk upaya peralihan ke energi alternatif yang lebih murah dan pemberian bantuan yang lebih selektif kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Indikasi dampak KKG 2008/09 di dua provinsi tersebut dapat dilihat dari turunnya angka ekspor. Di Papua, ekspor tembaga selama 2008 25% lebih rendah daripada ekspor komoditas yang sama pada 2007, sementara di Sulawesi Selatan, total volume ekspor produk pertambangan selama semester pertama 2009 turun 18,5% dan nilainya turun 68%.

2.4 Industri Manufaktur

Berdasarkan hasil pemantauan media, terlihat bahwa industri-industri manufaktur juga terkena dampak krisis walaupun tingkat keparahannya bervariasi antarindustri. Industri tekstil, garmen, dan alas kaki, serta elektronik dan automotif terkena dampak krisis yang paling parah. Industri makanan, minuman, dan rokok terkena dampak paling ringan meskipun beberapa perusahaan yang mengekspor produknya ke Amerika Serikat dan Jepang juga terkena imbas dampak krisis. Dalam kasus industri tekstil dan garmen, banyak artikel media dan laporan resmi mengemukakan potensi dampak negatif KKG 2008/09. Diperkirakan krisis ini akan menurunkan tingkat produksi sebanyak 10%. Mengingat bahwa terdapat 1,2 juta orang yang bekerja di industri ini, potensi terjadinya PHK dapat mencapai angka lebih dari 100.000 karyawan.

Pusat-pusat industri tekstil dan garmen di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten diberitakan telah mengalami dampak krisis. Di Bandung dan Cimahi, misalnya, data resmi mencatat banyak sekali karyawan di 40-an industri garmen dan tekstil yang telah dirumahkan akibat turunnya permintaan produk dan peningkatan harga input. Di Purwakarta, lebih dari 6.000 karyawan berpotensi mengalami PHK karena sebuah perusahaan di Amerika Serikat membatalkan kontraknya yang bernilai 2 juta dolar Amerika. Tidak jauh berbeda, 400.000 karyawan di industri tekstil dan garmen di Jawa Tengah (Solo, Kendal, Semarang, dan Boyolali) kemungkinan juga akan mengalami PHK akibat dibatalkannya order dari Amerika Serikat, Eropa Barat, Korea Selatan, dan Turki.

Studi yang dilakukan di salah satu desa di Kabupaten Bandung memperlihatkan potensi dampak KKG 2008/09 yang lebih parah terhadap industri-industri skala besar yang mengekspor produknya ke Amerika Serikat dan Eropa. Walaupun industri-industri tersebut masih memproduksi untuk memenuhi pesanan 2008, selama tahun ini kebanyakan perusahaan besar belum mendapatkan order baru untuk 2010. Perusahaan-perusahaan tersebut juga mengkhawatirkan persaingan usaha yang semakin ketat dengan Cina dan India di pasar garmen dan tekstil dunia yang semakin menyusut akibat KKG 2008/09. Oleh karenanya, walaupun perusahaan-perusahaan tersebut belum mem-PHK karyawannya, beberapa perusahaan tidak memperpanjang masa kerja para buruh kontrak dan kemungkinan kondisinya akan memburuk jika krisis terus berlanjut. Sebagian besar buruh kontrak yang kontraknya tidak diperpanjang mendapatkan pekerjaan di industri-industri garmen dan tekstil skala kecil dan menengah yang terletak di desa tempat studi dilakukan atau di desa tetangganya. Industri-industri berskala lebih kecil tersebut dapat bertahan hidup karena permintaan dari dalam negeri meningkat selama masa pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemilihan presiden pada awal tahun ini, serta menjelang perayaan Idulfitri pada September 2009. Namun, dengan beralih ke industri skala kecil, mereka mendapatkan upah yang lebih rendah daripada sebelumnya karena perusahaan kecil memberikan tunjangan yang lebih kecil daripada tunjangan dari perusahaan besar. Pada saat studi ini dilakukan pada Juli 2009, pekerja garmen dan tekstil di desa ini—sebagian besar perempuan—belum menyadari adanya dampak negatif KKG 2008/09.

Sebaliknya, aktivitas produksi di sebuah kawasan industri di Bekasi yang sebagian besar diisi oleh industri elektronik dan automotif sudah mulai menurun sejak Oktober 2008. Walaupun hanya satu perusahaan yang tutup, beberapa perusahaan telah menghentikan kegiatan produksinya untuk sementara waktu dan mengurangi jam kerja. Banyak buruh kontrak, sebagian besar dari subkontraktor tenaga kerja, tidak mendapat perpanjangan kontrak atau dalam beberapa kasus bahkan mengalami pemutusan kontrak sebelum masa kontrak mereka habis. Sementara itu, karyawan tetap tidak mendapatkan lembur atau hari kerjanya dikurangi. Kejadian tersebut berdampak serius terhadap perekonomian lokal karena banyak usaha-usaha lokal yang mendukung berbagai aktivitas di kawasan industri, seperti usaha transportasi, pengolahan limbah, rumah kontrakan, *catering*, warung makan, kios telepon genggam, *leasing* atau penyewaan (kebanyakan untuk mobil dan sepeda motor), subkontraktor tenaga kerja, dan toko, gulung tikar. Kelesuan ekonomi sangat terasa pada Februari 2009. Pada Agustus 2009, kondisi perekonomian sedikit membaik, terlihat dari mulai dilakukannya perekrutan buruh. Namun, pemulihan belum merata di seluruh wilayah dan semua jenis industri. Ada kecenderungan para buruh mendapatkan upah yang lebih rendah daripada sebelumnya karena sebagian besar perusahaan lebih memilih mempekerjakan pegawai yang baru lulus sekolah dan masih lajang untuk menghindari keharusan memberikan tunjangan keluarga. Beberapa perusahaan juga menerapkan sistem perhitungan upah lembur yang berbeda. Pemulihan ekonomi lokal juga berjalan lambat karena setelah mengalami kesulitan dan ketidakpastian hidup yang tinggi selama puncak krisis, para pekerja cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka.

2.5 Kerajinan Tangan

Berbagai jenis produk kerajinan tangan untuk tujuan ekspor juga mengalami kelesuan akibat turunnya permintaan dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Dari Bali, diberitakan bahwa produksi kerajinan perak dan topeng kayu anjlok sekitar 50% karena saat ini hanya menyelesaikan kontrak tahun lalu; sedangkan kontrak baru belum ada. Di Sumatra Selatan, sejak Oktober 2008, banyak pembeli dari Singapura dan Amerika Serikat tidak membeli sarung tenun songket lagi; oleh karenanya, beberapa penenun berhenti berproduksi. Di Jawa Timur, produksi hiasan dari kuningan turun sekitar 50% karena pesanan dari Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan Australia berkurang. Permintaan luar negeri terhadap berbagai jenis kerajinan tangan dari Jawa Tengah dan Yogyakarta juga menurun.

Hasil pemantauan lapangan di Lombok Barat yang memproduksi gerabah sebagai salah satu komoditas ekspor unggulannya, memperlihatkan bahwa bagi pembuat gerabah, dampak KKG 2008/09 sangat berbeda dengan dampak KKA 1997/98. Selama KKA 1997/98, para pengrajin gerabah mendapatkan keuntungan besar dari meningkatnya harga gerabah ekspor akibat depresiasi nilai rupiah. Hal ini mendorong perkembangan perekonomian lokal dengan dukungan industri hulu dan hilir bisnis gerabah. Sebaliknya, KKG 2008/09 memperburuk kecenderungan ekspor keramik yang sudah mulai menurun akibat Bom Bali pada 2002 dan 2005. Karena permintaan ekspor turun, hampir tidak ada order yang diterima dari Januari hingga Maret 2009. Hal ini telah menyebabkan penurunan industri kerajinan gerabah secara drastis. Banyak perempuan pembuat gerabah tidak mempunyai pekerjaan atau pendapatan lain, dan sebagian dari mereka beralih ke produksi alat-alat rumah tangga dari gerabah yang harganya jauh lebih murah tetapi dapat dijual di pasar lokal. Para laki-laki yang biasa membantu pembuatan gerabah pada umumnya beralih profesi menjadi pedagang keliling yang menjual berbagai produk, berjualan peralatan rumah tangga dari gerabah, atau bermigrasi ke daerah lain. Sebelumnya, sudah banyak warga



SMERU

desa yang merantau ke luar negeri untuk bekerja, namun akhir-akhir ini jumlahnya meningkat secara signifikan. Dampak krisis tidak hanya menyebar ke industri hulu dan hilir bisnis gerabah, tetapi juga ke perekonomian lokal. Saat ini para remaja mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di desa; sebelumnya usaha pembuatan gerabah menyerap banyak tenaga kerja remaja dan bahkan anak-anak (yang bekerja sepulang sekolah) untuk membantu dalam tahap *finishing*.

2.6 Pekerja Migran

Kelesuan ekonomi negara-negara yang terkena dampak KKG 2008/09 berpotensi memengaruhi pekerja migran internasional. Untuk memahami dinamika kondisi pekerja migran selama krisis, dilakukan studi kualitatif di sebuah desa di Malang yang lebih dari 40% rumah tangganya memiliki anggota rumah tangga yang pernah atau sedang menjadi pekerja migran. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan keluarga pekerja migran dan mantan pekerja migran, pekerja migran yang paling terkena dampak krisis adalah mereka yang bekerja di industri elektronik, automotif, dan konstruksi di Korea Selatan dan Malaysia. Pekerja migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dan yang bekerja di Timur Tengah tidak terkena dampak krisis. Para pekerja migran yang terkena dampak krisis kebanyakan tidak pulang ke kampung halamannya karena sebagian besar dari mereka masih tetap bekerja meskipun dengan jam kerja yang lebih pendek atau tanpa lembur. Akibatnya, pendapatan mereka turun dan oleh karenanya, uang yang mereka kirim pulang pun turun sekitar 25%–50%. Selain itu, beberapa pekerja migran yang belum mendapatkan perpanjangan kontrak diminta oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka supaya tidak pulang ke negeri asalnya, menunggu hingga kondisi pulih lagi.

Alasan lain mengapa para pekerja migran tersebut tidak pulang kampung adalah karena sebagian besar dari mereka adalah pekerja ilegal; oleh karenanya, jika mereka pulang akan sulit untuk kembali lagi. Masalah yang lebih serius dari itu adalah semakin sulitnya untuk menjadi pekerja migran akibat kompetisi yang semakin ketat. Misalnya, pemberlakuan kebijakan perekrutan tenaga migran antarnegara yang baru dan tidak transparannya sistem antrean dalam proses perekrutan sangat menyulitkan calon pekerja migran untuk pergi ke Korea Selatan, walaupun kini biayanya lebih rendah. Bagi keluarga pekerja migran di kampung halaman, berkurangnya uang kiriman yang mereka terima dari anggota keluarga yang bekerja di luar negeri tidak terlalu memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini terjadi karena mereka memiliki sumber pendapatan lainnya—beberapa di antaranya merupakan hasil pengembangan usaha dari uang kiriman sebelumnya. Sumber pendapatan warga desa seperti



SMERU

hasil padi, singkong, dan tebu juga memberikan pemasukan yang cukup besar. Oleh karenanya, dampak KKG 2008/09 terhadap perekonomian desa relatif kecil.

2.7 Pariwisata

Sektor lain yang berpotensi terkena dampak krisis, sebagaimana diberitakan secara luas di berbagai media, adalah sektor pariwisata. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan bahwa KKG 2008/09 akan menyebabkan turunnya tingkat kedatangan turis di Asia-Pasifik sebesar 6%. Namun, tampaknya dampak KKG 2008/09 terhadap industri pariwisata di Indonesia relatif kecil. Data statistik mengenai tingkat kedatangan turis di Bali, sebagai tujuan utama turis asing di Indonesia, memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang semakin menguat. Jumlah kedatangan turis asing di Bali dan Indonesia sudah lebih tinggi daripada sebelum Bom Bali I. Peningkatan tersebut kemungkinan disebabkan oleh masalah keamanan yang sedang dialami negara-negara tujuan wisata lain yang menjadi saingan Indonesia, seperti Thailand, dan peningkatan jumlah turis yang level konsumsinya rendah. Perubahan ini ditandai oleh berkurangnya jumlah turis dari Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan; dan meningkatnya jumlah turis dari Australia, Cina, dan Malaysia. Namun, peningkatan jumlah turis dari Malaysia dan Cina kurang berpengaruh terhadap perkembangan industri-industri pendukung sektor pariwisata lainnya dan perekonomian lokal pada umumnya karena turis-turis tersebut cenderung tidak banyak berbelanja. Akibatnya, walaupun jumlah kunjungan turis asing meningkat, penjualan kerajinan tangan di Bali justru menurun.

Kota-kota tujuan wisata asing lainnya seperti Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan melaporkan penurunan tipis jumlah kunjungan turis asing. Hal ini sejalan dengan kecenderungan meningkatnya jumlah turis beranggaran rendah yang hanya tinggal di Bali dalam waktu yang singkat dan tidak memperpanjang kunjungannya ke daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia. Walaupun demikian, dampak penurunan kunjungan turis asing terhadap tingkat hunian kamar hotel tidak signifikan karena tertutupi oleh peningkatan jumlah turis domestik.

3 Dampak terhadap Masyarakat dan Strategi Bertahan

Masyarakat yang terpengaruh oleh KKG 2008/09 tidak homogen dan tingkat keparahan dampak yang mereka rasakan pun tidak sama. Pada umumnya, KKG 2008/09 menyebabkan turunnya keuntungan usaha, pendapatan, dan kesempatan kerja. Pada gilirannya, hal ini dapat mengubah tingkat kesejahteraan sebagian

besar masyarakat yang terpengaruh krisis karena guncangan finansial yang terjadi dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar. Penurunan tersebut juga dapat menyebabkan perubahan kondisi keamanan dan hubungan sosial. Walaupun kelompok kaya seperti pelaku usaha, pemilik lahan perkebunan, dan pedagang mengalami kerugian yang cukup besar akibat krisis, sebagian besar dari mereka masih memiliki sumber daya lain atau simpanan modal untuk menghadapi turunnya pendapatan. Bagi kelompok lebih miskin seperti buruh tani, buruh serabutan, dan tukang ojek, dampak krisis terasa lebih parah karena mereka hanya memiliki aset yang terbatas untuk dapat bertahan hidup dalam situasi krisis. Dampak krisis yang dirasakan masyarakat dan strategi mereka untuk bertahan, sebagaimana terungkap dalam studi pemantauan kualitatif, dipaparkan di bagian berikut ini.

3.1 Dampak terhadap Pasar Tenaga Kerja

Studi di Bekasi memperlihatkan bahwa di sektor formal, industri yang terpengaruh krisis mengadopsi beragam strategi bertahan yang terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan. Biasanya, upaya yang pertama dilakukan adalah mengurangi jam kerja dan lembur karyawan. Pemberhentian sementara (dirumahkan) diberlakukan bagi staf permanen saat produksi sedang stagnan. Kelompok buruh yang paling dahulu diberhentikan adalah buruh kontrak yang sebagian besar dipekerjakan melalui subkontraktor tenaga kerja. Sebagian dari mereka tidak mendapatkan perpanjangan kontrak, sementara sebagian lainnya mengalami pemutusan kontrak sebelum masa kontrak habis tanpa mendapatkan kompensasi sama sekali. Buruh kontrak biasanya menganggur selama kira-kira 1–2 bulan sebelum dikontrak lagi; namun krisis yang terjadi saat ini cenderung memperpanjang masa menganggur buruh kontrak. Kalau mereka beruntung, mereka bisa mendapatkan kontrak lagi paling cepat 3–4 bulan kemudian.

Pada Februari 2009, kebanyakan perusahaan tidak merekrut karyawan baru dan sebagian besar subkontraktor tenaga kerja melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan order, terutama dari perusahaan-perusahaan otomatis dan elektronik. Pada Agustus 2009, beberapa perusahaan mulai merekrut karyawan lagi. Selama krisis, kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat dan hal ini berakibat pada meningkatnya kasus penipuan dalam penempatan tenaga kerja dan menurunnya pendapatan karena calon karyawan terpaksa menerima berapa pun gaji yang ditawarkan. Beberapa perusahaan, misalnya, mengubah sistem perhitungan lembur dari sistem lama yang didasarkan pada gaji kotor ke sistem baru yang berdasarkan gaji pokok. Beberapa perusahaan lain hanya menerima karyawan yang masih lajang untuk menghindari kewajiban menyediakan tunjangan keluarga; oleh karenanya, beberapa calon karyawan yang sudah menikah dan melamar kerja mengaku lajang dan karenanya tidak mendapat tunjangan keluarga. Dalam keputusan, beberapa pekerja bersedia bekerja di perusahaan lain atau di perusahaan kecil yang menawarkan upah yang lebih rendah. Artinya, pekerja menerima penghasilan yang lebih rendah serta merasa lebih tidak aman dengan kesinambungan pekerjaannya. Sebagai akibatnya, meski permintaan tenaga kerja mulai meningkat dan buruh yang telah mengalami pemutusan kontrak bisa mendapatkan pekerjaan lagi, para pekerja tersebut masih sangat berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka.

Dalam bisnis perkebunan, buruh tani yang tidak memiliki lahan menanggung dampak krisis yang paling parah karena pemilik lahan berusaha memangkas pengeluaran untuk upah buruh dengan memberhentikan buruh taninya. Buruh tani terpaksa mencari pekerjaan lain: sebagian mencari pekerjaan dengan melakukan kegiatan usaha ilegal seperti penambangan liar, sementara sebagian

lainnya bermigrasi ke daerah lain, mengumpulkan hasil hutan yang sudah sangat langka di daerah perkebunan kelapa sawit, atau bekerja serabutan dengan pendapatan yang tidak menentu.

Bagi perempuan, krisis telah menyebabkan berkurang atau hilangnya pendapatan. Dalam kasus industri kerajinan tangan dan mebel di Lombok Barat dan Jepara, banyak perempuan kehilangan kesempatan kerja. Hal ini juga bisa terjadi jika industri garmen jatuh bangkrut karena sebagian besar karyawan di industri ini adalah perempuan. Dalam kasus perkebunan karet dan kelapa sawit, perempuan dari rumah tangga buruh tani terpaksa bekerja serabutan dengan upah rendah.

Bagi remaja, krisis telah berakibat pada persaingan di pasar tenaga kerja yang lebih ketat. Di Lombok Barat, berhentinya produksi gerabah menyebabkan hilangnya pekerjaan banyak remaja. Sebelumnya, mereka bekerja mendekorasi dan memberikan sentuhan akhir pada gerabah. Remaja di daerah produksi mebel di Jepara menghadapi situasi yang sama akibat krisis ini. Turunnya jumlah kesempatan kerja bagi remaja yang sebelumnya tertampung sebagai pekerja harian di perkebunan kelapa sawit di Kampar telah menyebabkan peningkatan kasus kejahatan. Selama puncak krisis, banyak remaja menjadi *ninja* (istilah penduduk lokal untuk pencuri kelapa sawit atau *lump* karet dari perkebunan kelapa sawit atau perkebunan karet milik negara).

3.2 Dampak terhadap Konsumsi Makanan

KKG 2008/09 tidak menyebabkan kenaikan harga bahan pangan secara signifikan, namun harga bahan pangan sudah cukup mahal akibat krisis bahan bakar. Oleh karenanya, pendapatan pekerja yang lebih rendah akibat krisis memperburuk keadaan ekonomi yang sudah sulit. Untuk mengatasi situasi ini, kebanyakan rumah tangga di desa-desa yang dikaji masih mempertahankan tingkat konsumsi makanan pokok. Mereka cenderung mengurangi konsumsi protein atau beralih ke sumber protein yang lebih murah, dan mengurangi pembelian makanan siap saji. Jika tersedia, mereka juga mengambil sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian dari daerah sekitarnya; namun, perubahan pola pemanfaatan lahan menyebabkan bahan pangan tersebut semakin sulit dicari di daerah industri dan perkebunan kelapa sawit. Warga desa juga membeli barang dalam kemasan yang lebih kecil atau dengan berutang; dalam hal ini terbantu oleh tukang sayur keliling dan warung setempat yang mengizinkan warga desa untuk berutang. Program bantuan pemerintah yang dianggap bermanfaat dalam kaitan dengan konsumsi makanan adalah Raskin (Beras untuk Warga Miskin), tetapi manfaat program tersebut berkurang karena jadwal distribusi yang tidak menentu. Karena warga desa tidak tahu kapan beras akan dibagikan, mereka tidak selalu siap dengan dana untuk membeli beras subsidi tersebut. Di banyak daerah, aparat desa memperbolehkan semua warganya untuk membeli beras Raskin; sementara meskipun terpengaruh oleh krisis, pekerja migran tidak diperbolehkan membeli Raskin karena beras subsidi tersebut hanya dialokasikan untuk penduduk lokal.

3.3 Dampak terhadap Pendidikan

Berkaitan dengan pendidikan, studi-studi kualitatif tidak menemukan adanya kasus putus sekolah di sekolah dasar (SD). Meski krisis telah menyebabkan berkurangnya uang jajan anak sekolah, hal ini tidak menyebabkan mereka tidak pergi ke sekolah. Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan bantuan pemerintah daerah kepada sekolah-sekolah (terutama di Banjar) telah mengurangi biaya sekolah secara signifikan atau bahkan menghapusnya sehingga biaya sekolah menjadi lebih terjangkau sekalipun dalam masa krisis.



Kondisi di sekolah menengah pertama juga hampir sama, tetapi kasus putus sekolah dilaporkan terjadi di Kampar. Hal ini terjadi karena sekolah tersebut terletak jauh dari desa dan sebagian keluarga miskin tidak mampu menanggung biaya hidup dan transportasi anaknya selama puncak krisis. Di samping itu, saat harga kelapa sawit mulai naik lagi, pengurus sekolah meminta uang pangkal dari anak-anak yang ingin bersekolah kembali, sedangkan orang tua mereka tidak mampu membayarnya. Siswa sekolah menengah atas (SMA) cenderung lebih rentan untuk mengalami putus sekolah. Di Banjar, sejumlah murid pindah ke sekolah yang lebih murah, sementara di Kampar beberapa murid SMA dilaporkan telah putus sekolah.

Di sebuah desa di Bekasi, selain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat juga memberikan bantuan pendidikan berupa alat-alat tulis bagi murid SD dan sejumlah komputer untuk beberapa sekolah. Organisasi masyarakat setempat juga memberikan beasiswa bagi anak-anak yatim piatu; namun, krisis telah menyebabkan turunnya pendapatan para donatur yang sebagian besar adalah pekerja di kawasan industri sehingga mengancam keberlanjutan pemberian beasiswa tersebut.

3.4 Dampak terhadap Kesehatan

Pada umumnya, kondisi kesehatan masyarakat di desa-desa yang terpengaruh krisis tidak banyak berubah walaupun pemantauan kualitatif mengungkap beberapa perubahan perilaku dalam hal mencari pelayanan kesehatan. Studi-studi kualitatif tersebut menemukan terjadinya penurunan jumlah kunjungan ke klinik dan bidan swasta walaupun penyedia layanan kesehatan swasta tersebut telah menurunkan biaya pengobatan. Semakin banyak warga desa yang mengobati diri sendiri dan membeli obat dari toko obat. Terungkap juga bahwa kunjungan ke puskesmas meningkat. Di tiga desa yang dikaji, pemerintah kabupaten menyediakan layanan rawat jalan gratis di puskesmas, sementara di desa-desa lain, tarif layanan serupa relatif terjangkau. Untuk mempermudah akses masyarakat miskin ke layanan kesehatan, Pemerintah Pusat menyediakan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), namun sebagian rumah tangga miskin tidak memiliki kartu Jamkesmas untuk bisa mendapat manfaat program ini.

Masyarakat yang terpengaruh krisis tidak hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan manfaat program Jamkesmas. Bagi pekerja di sektor formal, asuransi kesehatan umumnya ditanggung oleh perusahaan atau dijamin melalui Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), tetapi perusahaan tidak menanggung pembayaran klaim jika pekerja telah di-PHK. Selain itu, sebagian anggota Jamsostek tidak mengerti cara mengklaim manfaat program.

3.5 Dampak terhadap Keamanan dan Kehidupan Sosial

Saat krisis mencapai puncaknya, tingkat kejahatan di beberapa desa yang terpengaruh dampak krisis cenderung meningkat. Misalnya, di Bekasi, kasus pencurian sepeda motor dan telepon genggam lebih sering terjadi; sementara di Kampar, banyak remaja dan penganggur mencuri kelapa sawit dan *lump* karet dari perkebunan. Peningkatan kasus kejahatan tersebut bersifat sementara dan dapat dikendalikan melalui pengamanan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Di Lombok Barat, kompetisi usaha yang semakin ketat di antara toko-toko penjual barang seni (*art shop*) memicu persaingan yang tidak sehat. Pemandu wisata hanya membawa para pelanggan ke toko-toko yang membayar komisi tinggi kepada pemandu wisata tersebut. Hal ini meningkatkan ketegangan antarpemilik. Di tingkat rumah tangga, di semua desa yang terpengaruh krisis, ketegangan dalam rumah tangga meningkat akibat kesulitan ekonomi, namun tidak ada laporan peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kelesuan ekonomi selama krisis juga berakibat pada turunya aktivitas sosial. Frekuensi dan dana arisan mengalami penurunan di Banjar dan Lombok Barat. Di Banjar, partisipasi masyarakat miskin dalam kelompok-kelompok pengajian juga menurun. Mereka merasa malu untuk hadir karena tidak mampu membayar arisan. Di Lombok Barat, sumbangan untuk pembangunan dua buah masjid di sebuah desa juga berkurang sehingga pembangunannya tertunda. Di Bekasi, sumbangan untuk sebuah badan amal setempat yang menyediakan bantuan bagi anak-anak yatim piatu juga menurun.

Paling tidak di dua desa yang dikaji, krisis telah berakibat pada perubahan kepemilikan aset. Di Bekasi, beberapa toko kecil yang sebelumnya dimiliki oleh penduduk setempat telah dijual kepada pengusaha dari kabupaten lain. Di Kampar, beberapa pemilik perkebunan kelapa sawit menjual sebagian lahannya. Namun, fenomena yang paling sering terjadi selama krisis adalah harus dikembalikannya banyak mobil dan sepeda motor yang dibeli dengan kredit kepada *dealer* atau perusahaan pembiayaan.

4 Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, krisis keuangan global 2008/09 telah memengaruhi beberapa kelompok masyarakat di Indonesia, terutama melalui produksi-produksi yang berorientasi ekspor. Sektor-sektor yang paling terkena dampak krisis adalah perkebunan karet dan kelapa sawit; industri kayu dan mebel kayu; industri pertambangan; industri manufaktur, terutama industri tekstil dan garmen; industri automobil dan elektronik; dan industri kerajinan tangan. Baru-baru ini, mulai terlihat tanda-tanda pemulihan di perkebunan karet dan kelapa sawit, industri pertambangan, dan industri elektronik dan automobil. Namun, tanda-tanda pemulihan belum terlihat di industri kayu dan mebel kayu, industri kerajinan tangan, dan industri tekstil dan garmen. Dampak KKG 2008/09 terhadap keluarga pekerja migran di kampung halamannya, sektor pariwisata, dan industri perikanan sangat terbatas.

Tingkat keparahan dampak krisis tidak seragam dan kelompok yang lebih miskin dalam masyarakat yang terpengaruh krisislah yang cenderung paling menderita. Di daerah-daerah yang terkena dampak KKG 2008/09 juga terjadi persaingan yang lebih ketat di pasar tenaga kerja sehingga tingkat upah menurun dan jumlah kasus penipuan dalam penempatan tenaga kerja meningkat.

Turunnya pendapatan tidak berpengaruh terhadap konsumsi makanan pokok, tetapi menurunkan tingkat konsumsi protein. Kesulitan ekonomi tidak memengaruhi tingkat kehadiran siswa di SD dan di kebanyakan SMP, tetapi mengancam kelangsungan pendidikan siswa di SMA. Kondisi kesehatan masyarakat di desa yang dikaji tidak terpengaruh secara signifikan walaupun terlihat adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mencari layanan kesehatan. Di tingkat masyarakat, krisis telah menyebabkan kejahatan dan ketegangan antarpelaku usaha dan di dalam rumah tangga. Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial juga menurun dan terjadi beberapa perubahan dalam kepemilikan aset. ■



ⁱ Pemantauan kualitatif di tingkat lokal dilakukan melalui serangkaian FGD (focus group discussion—diskusi kelompok terfokus) dan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh desa, pelaku usaha, dan anggota masyarakat (perempuan dan laki-laki) yang berpotensi terpengaruh krisis keuangan global 2008/09.

ⁱⁱ Dari tujuh kelompok masyarakat, tiga dikunjungi pada akhir Juli 2009 (Bandung, Kampar, dan Lombok Barat), satu pada akhir Agustus 2009 (Bekasi—yang juga dikunjungi saat studi pilot pemantauan kualitatif IDS pada Februari 2009), dan tiga lainnya pada pertengahan September 2009 (Jepara, Malang, dan Bitung). Pada awal Agustus 2009, tim studi juga melakukan kunjungan singkat ke Bali untuk mengumpulkan data sekunder terkait industri pariwisata.

ⁱⁱⁱ Studi pilot pemantauan kualitatif ini merupakan bagian dari studi di lima negara yang didukung oleh IDS. Studi pilot tersebut dilakukan di sebuah kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan di sebuah perkebunan karet di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Laporan pantauan berkala ini disusun oleh Widjajanti Isdijoso berdasarkan beberapa penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri atas peneliti SMERU dan peneliti daerah, yaitu Rizki Fillaili, Rachma Indah Nurbani, Bambang Sulaksono, Herry Widjanarko, Nina Toyamah, Nur Aini, Hastuti, Syaikhul Usman, Syahbudin Hadid, Andi Chairil Ichsan, Firdaus Komar, Arifudin, Kausar, Ruhmaniyati, Pitriati Solihah, Erfan Agus Munif, Kalla Manta, Faturachman, dan Agus Sasongko; serta pemantauan terhadap media nasional dan daerah yang dilakukan oleh Nur Aini, Rachma Indah Nurbani, Hariyanti Sadali, Ratna Dewi, Justin Sodo (nasional), Ara Wiraswara (daerah; Bogor), Ari Ratna Kurniastuti (Malang), Faisal Fuad Seif (Banjarmasin), Firdaus Komar (Palembang), Gunadi (Medan), Johan Subarkah (Yogyakarta), Suardi Bakri (Makassar), dan Syahbudin Hadid (Mataram). Kedua kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka kajian "Pemantauan Dampak Sosial-Ekonomi Krisis Keuangan Global 2008/09 di Indonesia" yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU. Editor: Liza Hadiz. Penerjemah: Budhi Adrianto.